

Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia

Aswan Haryadi¹

Nurhasanah Muthia²

Abstract

The Islamic State of Iraq and Syria are Islamist groups who have radical thoughts and understand that trying to master many areas in Syria and also Iraq. The group is eager to establish a country controlled by a religious and political leader, according to the Islamic law or Sharia. The political movement of the Islamic State of Iraq and Syria is committed to the region and will expand its influence throughout the world by way of doing a propaganda to sympathizers. They get the support of the citizens of the Muslim around the world. ISIS itself has spread in Indonesia, an early manifestation of ISIS getting into Indonesia is through the media. The movement has spread its influence and recruit followers in Indonesia marked by the presence of citizens of Indonesia to join ISIS and support radical groups in Indonesia. ISIS has been declared a terrorist group by the Government of Indonesia. The Government of Indonesia declared radical pragmatism rejects and intolerant of political stability that may disrupt security in Indonesia. to prevent society from schools-schools Indonesia Government to make radical deradicalisation policy with the support of community participation and institutional religion in combating radical pragmatism-understand the intolerant.

Keywords:

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS); Radical; Political Stability; Indonesia Security; Deradicalitation.

A. Pendahuluan

Kemunculan gerakan politik Islam radikal di awal abad ke-21 ini memang menjadi fenomena yang menarik. Gerakan politik Islam radikal bersikap sebagai suatu tantangan politis di dalam dunia modern. Gerakan Islam radikal kontemporer secara geografis tersebar di seluruh wilayah Timur Tengah, Asia-

Tenggara, Eropa, dan Afrika. Faktanya, hampir tidak ada satu wilayah pun di dunia yang tidak ada gerakan tersebut (Frisch & Inbar, 2008, hlm. 1).

Kelompok-kelompok Islam radikal tersebut mengkampanyekan jihad untuk melawan berbagai macam pemerintahan non- Muslim dengan tujuan mendirikan Negara Islam (Tim Penyusun CSR, 2005, hlm. 9).

¹ Jurusan Hubungan Internasional Fisip UNPAS, untuk keperluan akademik yang bersangkutan dapat dihubungi melalui Email aswan.haryadi@unpas.ac.id.

² Jurusan Hubungan Internasional Fisip UNPAS.

Tetapi, dalam jangka waktu ini terdapat satu kelompok Islam radikal yang telah melakukan keseluruhan hal tersebut dan memulai dengan aksi teror. Kelompok tersebut menamai diri mereka Negara Islam (NI) atau *The Islamic State* (IS). Gerakan politik Islam radikal ini merupakan kelompok radikal paling berbahaya yang terkaya dan tersukses di dunia. Seluruh dunia sebagian besar mengenal kelompok ini dengan sebutan *The Islamic State in Iraq and Syria* atau *the Islamic State in Iraq and al-Sham* (ISIS) (Spencer, 2015, hlm. 24-25).

Pada tanggal 29 Juni 2014 al-Baghdadi mengubah nama menjadi Islamic State (IS). Mereka menanggalkan nama Iraq dan Syria atau the Levant untuk menegaskan bahwa mereka menghendaki wilayah penguasaan lebih luas dari pada sekedar kedua wilayah tersebut. Maka muncul ISIS yang sekarang ini, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat sebagai kombinasi antara ideologi jihadisme, militer, militansi, dan kekerasan. Dengan ideologi khilafah dan Sunni, keberadaan ISIS ini bertujuan menandingi keberadaan insitusi Shi'ah di negara-negara yang ada Timur Tengah (BBC, 2017). Bahkan, di bawah kepemimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi ISIS mendeklarasikan Negara Islam di sepanjang Iraq dan Suriah dan juga menyatakan Al-Baghdadi akan menjadi pemimpin bagi umat muslim di seluruh dunia (Niam, 2014).

ISIS merupakan ancaman yang lebih besar dari al Qaeda, HAMAS, Hizbullah, Boko Haram dan seluruh gerakan Islam radikal lainnya. Tidak dapat disangkal bahwa keberhasilannya lebih besar. Gerakan politik Negara Islam menjadi gerakan Islam radikal pertama yang memerintah hamparan wilayah yang

luas untuk jangka waktu yang panjang. Kelompok ini telah memenangkan loyalitas sebagian besar jihadis di seluruh dunia. Gerakan Negara Islam telah menyerukan kepada seluruh Muslim di dunia untuk melakukan serangan terhadap negara-negara Barat (Niam, 2014).

Pembentukan Negara Khalifah yang dinyatakan oleh Negara Islam, saat ini termasuk sebagian besar Irak dan Suriah, dari pinggiran Baghdad ke pinggiran Aleppo. Namun, Negara Islam berusaha untuk memperluas Negara Khilafahnya keseluruh duia. Pada tanggal 29 Juni 2014, gerakan politik Negara Islam telah mencapai titik pembentukan Khilafah (sebuah pemerintahan yang mempersatukan seluruh Muslim di seluruh dunia). Kelompok yang memiliki nama Negara Islam di Iraq dan Suriah (NIIS) atau *Islamic State in Iraq and Syiria* (ISIS), menghapus setengah namanya dan menyebut diri mereka Negara Islam atau *Islamic State*. Klaim ini merupakan upaya dalam pembentukan sebuah kekhalifahan baru dan menjadi daya tarik gerakan politik Negara Islam bagi Muslim di seluruh dunia dan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang bepergian dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan gerakan ini (Spencer, 2015, hlm. 26).

Dalam penyebaran ideologi radikal di era globalisasi ini, para kelompok radikal ini memanfaatkan penyebaran informasi melalui komunikasi internasional menyebarkan propaganda untuk memberikan ancaman bahkan mengajak masyarakat sipil bergabung dalam gerakan ini (Fathurin, 2002, hlm. 21).

Terbukti fenomena pejuang luar negeri di Irak dan Suriah benar-benar

global, dengan sekitar 86 negara melihat sedikitnya satu warga negaranya berangkat ke Suriah untuk bertempur bersama dengan kelompok-kelompok ekstrimis di sana, terutama gerakan Negara Islam. Lahan subur perekrutan telah muncul dan tersebar dalam arus global. Pada bulan Februari 2015, lebih dari dua puluh ribu Muslim dari seluruh dunia telah berangkat ke Irak dan Suriah untuk berjihad dengan gerakan Negara Islam (Fathurin, 2002, hlm. 21).

Mereka menjadi kelompok jihadis melalui kekerasan dan berusaha memperjuangkan Islam secara Kaffah, di mana syariat Islam sebagai hukum negra dan berusaha meyakinkan sesama muslim bahwa penggunaan kekerasan disahkan. Proyek Iskam Khilafah yang dicanangkan oleh Negara Islam menarik banyak perhatian para pejuang asing dari seluruh dunia. Ketika menjadi mercusuar bagi para banyak perekrutan dan jaringan fasilitas/logistik. Selanjutnya mereka yang telah berjuang bersama Negara Islam membuat koneksi dengan satu sama lain. Negara Islam juga terus membangun prestise dan legitimasi dalam ke seluruhan gerakannya (Zelin, 2015, hlm. 45).

Ancaman terhadap keamanan dunia pun hadir seiring dengan eksistensi dan pergerakan ISIS dalam upayanya mencapai kepentingan dalam menciptakan negara Islam. Berbagai strategi militer yang digunakan oleh ISIS, seperti pembunuhan massal, penculikan anggota kelompok keagamaan dan suku, dan pemenggalan tentara dan wartawan, telah menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan manusia dan keamanan negara. ISIS sebagai sebuah fenomena yang telah mengancam kehidupan masyarakat luar. Hal lain yang menjadikan ISIS sebagai

ancaman keamanan memberikan dampak kepada *human security* dan *national security* (Fisher & Prucha, 2016). Serangan-serangan teror yang dilakukan di belahan dunia barat pun semakin gencar, seperti serangan teror di enam lokasi yang berbeda di kota Paris. Hal tersebut menimbulkan efek terorisme menjadi ancaman kemanan yang nyata. Secara paralel, balasan dari upaya menghadapi dilema teroris ini berupa hukum, negara berhak wajib untuk mengambil langkah dalam rangka melindungi kesejahteraan warga negaranya (Elgot dkk., 2015).

Kekejaman ISIS bukan representasi Islam. Kekejaman ISIS yang melampaui batas kemanusiaan pun menuai protes dari umat Islam di Baghdad yang memprotes tindakan ISIS yang membunuh dan mengusir umat Kristiani di Mosul (The New York Times, 2014).

Gerakan radikal berlandaskan agama yang ingin mengubah tatanan politik di Indonesia pun tidak lepas dari gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan ini melakukan perlawanan termasuk secara militer kepada pemerintahan yang sah yang dianggap “murtad” karena menolak syariat Islam di Indonesia (Solahudin, 2001, hlm. 53).

Gerakan ini telah muncul sejak tahun 1948, namun baru diproklamkan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Gerakan ini dianggap menjadi cikal bakal kelompok-kelompok perlawanan berlandaskan agama di Indonesia. Walau secara formal gerakan ini berhasil ditumpas pada tahun 1962 yang ditandai dengan ditangkapnya Kartosoewirjo pada 4 Juni 1962, namun

gerakan ini sebenarnya tidak benar-benar mati (Solahudin, 2001, hlm. 53).

Indonesia menjadi Negara dengan pergerakan kelompok yang sangat dinamis untuk melawan pemerintahan dan mengubah tatanan politik yang ada. Salah satu ancaman nyata pada saat ini ialah gerakan radikal Negara Islam. Selain menjaring perekrutan jihadis di seluruh dunia, Negara Islam melakukan serangan-serangan terror di seluruh dunia. Serangan teroris transnasional yang disebut melibatkan kelompok radikal ISIS pernah terjadi di Indonesia. Tragedi Bom Sarinah pada tahun 2016 menggegerkan dunia, karena ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan ini. Serangan itu menunjukkan bahwa pendukung ISIS di Indonesia bertekad untuk kembali menempatkan negara pada peta terorisme global, tetapi korban tewas relatif rendah karena kemampuan terbatas jaringan ISIS di Indonesia (Tomsa, 2016).

Hari ini jaringan dukungan ISIS di Indonesia terdiri dari jumlah kelompok yang terorganisir secara longgar seperti Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dan salah satu warga negara Indonesia yaitu Bahrin Naim dengan jelas tergabung dalam kelompok jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah yang diketahui telah berbaiat ke ISIS (Tomsa, 2016).

Gerakan radikal *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) merupakan bukti nyata terorisme telah menjadi satu kekuatan untuk melancarkan aksi kekerasan dengan mengatas namakan paham radikal untuk menyerang rezim yang tidak sejalan dengan paradigma yang diyakini.

Melihat besarnya tingkat ancaman kelompok Islam radikal dengan tujuan mengubah sistem politik di Indonesia terlebih teror di pergerakan ISIS yang menjadikan Indonesia sebagai basis perekrutan militan. Maka, fenomena kejahatan ini dapat berdampak besar terhadap stabilitas keamanan dan berpotensi mengganggu serta mengancam pembangunan nasional, maka Indonesia senantiasa konsisten dalam upaya penegakan hukum dan melindungi warga negara dari mata rantai kejahatan lintas negara. Indonesia perlu meningkatkan stabilitas keamanan dan berupaya dalam menanggulangi ancaman nyata berupa teror dan radikalisme di Indonesia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

B. Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah di Indonesia

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL) dalam bahasa Indonesia mereka disebut Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS), merupakan sebuah organisasi yang berasaskan Islam. Sekarang berubah menjadi *Islamic State* (IS) atau Negara Islam (Hilmy, 2014, hlm. 406-407).

Dikabarkan ISIS sekarang ini beranggotakan kurang lebih sekitar 1.500 milisi lintas negara dan seorang komandan perang yang memiliki gaya kepemimpinan khas al-Qaeda, telah berkembang menjadi ancaman di seluruh dunia (Hilmy, 2014, hlm. 406-407).

Fenomena ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) atau NIIS (Negara Islam Irak dan Suriah) — selanjutnya disebut NIIS — di Timur Tengah yang

resonansinya begitu kuat dirasakan di seluruh penjuru dunia, terutama di negara-negara berpenduduk Muslim seperti Indonesia. Berbagai ulasan dan respons intelektual telah diberikan di sejumlah media. Namun demikian, fokus utama perjuangan Negara Islam lebih berfokus pada ideologi gambaran kekuatannya, ekspansinya, dan getaran pengaruhnya di negeri ini (Hilmy, 2014, hlm. 406-407).

Akibat serangan kilat NIIS, korban jiwa di kalangan masyarakat sipil ditengarai telah melampaui angka 2.400 orang. Mereka juga telah menyebabkan sejumlah 30 ribu warga di Timur Suriah mengungsi. Gerakan radikal ini mendapatkan dukungan dari para "mujâhid" yang berasal dari berbagai negara di dunia, baik negara sekuler di Barat maupun negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Seperti diketahui, disinyalir terdapat 56 orang WNI yang mengikuti gerakan ini. Ajakan terbuka dari salah seorang WNI dengan berbahasa Indonesia yang ditujukan bagi umat Islam di negeri ini dapat disaksikan bersama melalui media YouTube. Gerakannya menyerupai organisme modern yang didukung oleh infrastruktur kenegaraan yang memadai. Maka, jadilah NIIS seperti sekarang ini, dengan mudahnya melakukan ekspansi dan penguasaan militer atas beberapa wilayah penting di kawasan dimaksud. Satu demi satu, kota-kota penting di Irak pun jatuh ke tangan NIIS, seperti Fallujah, Tikrit dan Mosul, kota terbesar kedua setelah Baghdad (Vick, 2014).

Aksi Negara Islam sama seperti teroris yang tujuannya menegakkan syariat Islam, adanya bom bunuh diri, menakut-nakuti, meneror masyarakat Indonesia. Dengan adanya kemunculan

video yang terkait dengan propaganda ISIS, di mana dalam video tersebut ada seorang pria asal Indonesia bernama Abu Muhammad al-Indonesi yang mengajak agar rakyat Indonesia mendukung perjuangan ISIS menjadi khilafah dunia. Propaganda melalui media sosial dilakukan dengan menggunakan dalil-dalil jihad dan khilafah sehingga beberapa warga Indonesia terpengaruh dan bergabung dengan kelompok tersebut (Kompas.com, 2014).

Pergerakan ISIS di Indonesia menimbulkan dampak bagi negara dan warga negaranya, dampak yang timbul ialah warga Indonesia yang terpengaruh pada ideologi ISIS ini pergi ke Suriah untuk bergabung dengan anggota ISIS yang ada disana. Dampak lainnya ialah tidak stabilnya pemikiran umat Islam Indonesia yang mudah terpengaruh paham-paham radikal, sehingga dampak sosial yang ada ialah banyaknya pemuda-pemuda yang bergabung dengan ISIS karena target utama ISIS untuk merekrut kaum muda (Muhaimin, 2015).

Melihat mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim membuat Indonesia dijadikan salah satu lokasi perekrutan jihadis-jihadis yang siap berjuang di Irak dan Suriah atau menyebarkan pengaruh ideologi pandangan radikal di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menolak paham "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan yang menaung dalam NKRI. Pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia sudah sepakat mengaris bawahi paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) adalah gerakan radikal yang

mengatasnamakan Islam (Susetyo, 2016, hlm. 45).

Ada tiga hal yang mendasari larangan tersebut. Alasan pertama adalah sumber dana besar yang diraih ISIS kabarnya banyak didapat dari hasil tindak kriminal. Alasan kedua adalah adanya indoktrinasi konsep baiat (kekerasan) dalam aksi yang dilakukan oleh ISIS, di mana jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun hal ketiga adalah karena ISIS ingin membentuk sistem kekhalifahan atau negara Islam, di mana jelas bertentangan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah menjadi harga mati negeri ini (Susetyo, 2016, hlm. 45).

Maka dari itu sebagai Negara Kesatuan Indonesia perlu menjaga stabilitas politik kemanan demi tercapainya rasa aman bebas dari ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat baik sipil, militer dan pemerintah bekerja sama dalam mencegah paham radikal dan sifat intoleran yang dapat menjadi ancaman disintegrai bangsa (Susetyo, 2016, hlm. 45).

C. Ideologisasi Intrument Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah di Indonesia

Dalam upaya perekrutan jihadis, Negara Islam menyebarkan ideologi radikal untuk menarik para pejuang muslim bergabung. Ideologi utama gerakan NIIS adalah takfir (mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengannya) dan membunuh siapa saja yang menentang ideologi keagamaannya. Ideologi takfir ini mengingatkan kita pada sebuah gerakan Islam radikal di Mesir

yang bernama al-Takfir wa al-Hijrah yang bertanggungjawab terhadap pembunuhan Presiden Anwar Sadat pada tahun 1981. Dengan ideologinya yang ultrapuritan, Negara Islam telah menghancurkan banyak masjid di wilayah yang mereka duduki. Mereka berkeyakinan bahwa masjid-masjid tersebut telah menjadi tempat pemujaan yang dianggap musyrik atau bertentangan dengan aqidah tauhid. Bahkan mereka berniat melakukan ekspansi ke seluruh dunia Islam dan menghancurkan bangunan Kaabah di Mekkah karena menurut mereka telah berfungsi sebagai pusat pemujaan kemusyrikan (Purwawidada, 2014, hlm. 104).

Mobilisasi kaum jihadis dari Suriah ke Iraq terjadi karena panjangnya perbatasan kedua negara di timur laut dan sangat longgar. Pergerakan para pejuang NIIS ke Iraq tidak terawasi dengan baik oleh otoritas masing-masing negara. Adapun mobilisasi para jihadis Indonesia dapat dilakukan melewati Turki yang juga berkepentingan agar rezim Bashar al-Assad jatuh. Di perbatasan Turki-Suriah terdapat sejumlah pihak yang membantu para jihadis memasuki Suriah. Otoritas Turki jelas menutup mata terhadap pergerakan massal kaum jihadis yang melewati perbatasannya untuk memasuki Suriah. Setelah memasuki Suriah, mereka menyebar ke berbagai distrik di wilayah ini sebagai basis perlawanan anti rezim Bashar al-Assad (Ali, 2014, hlm. 335-336).

Negara Islam termasuk ke dalam organisasi jihad-salafisme. Salafisme dan menyebarkan ideologi jihad sebagai alat pergerakan utama demi menuju ke khalifahan diseluruh dunia. Jihadi-Salafisme merupakan kombinasi antara

dua paham, yakni aksi Jihad dan pengembalian paham-paham kitab suci yang literal. Secara sederhana, Kepel mengartikan paham JihadiSalafisme pada masa 1990-an adalah sebuah ide doktrin politik yang bertujuan untuk mengembalikan pemahaman Islam literal yang fundamental di era modern melalui aksi perlawanan, khususnya melawan AS dan negara Barat (Bunzer, 2015, hlm. 1-45).

Kepel menambahkan Jihad-Salafisme menggambarkan sebuah doktrin gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan masa kejayaan Kekhalifan di era modern melalui slogan "Jihad". Secara etimologi, kata "Salaf" berarti "yang lampau", di mana terminologi Salafisme diartikan sebagai sebuah istilah yang merujuk kepada pengembalian masa lampau terkait zaman keemasan Islam di era Kekhalifan, yakni tiga generasi pertama: (para sahabat, *tâbi'în*, dan *tâbi' al-tâbi'în*). Kemudian, pemahaman terhadap Salafisme di era modern saat ini mengalami pergerseraan makna oleh beberapa kalangan. Media dan buku-buku akademis mengartikan paham Salafi sebagai gerakan yang merujuk kepada Islam intoleran, rigid bahkan reaksioner (Bunzer, 2015, hlm. 1-45).

Dengan ideologi tersebut, Negara Islam memberikan pengaruh terhadap perpolitikan dunia, dan menjadikan Negara Islam begitu dikenal oleh masyarakat dunia, bahwa melakukan aksi radikal di sah kan demi tercapainya ke khalifan. Berlarut-larutnya penanganan kekerasan di Iraq dan Suriah dapat menciptakan medan jihad baru sebagaimana pernah terjadi di Afghanistan. Para alumni perang Afghanistan kemudian membentuk

ikatan-ikatan milisi baru di Indonesia sepulangnya dari berjihad di negara tersebut dan mereka menjadikan Indonesia sebagai medan perjuangan berikutnya untuk melancarkan perang melawan ke kafiran.

Bila konflik di Iraq-Suriah ini dapat diakhiri, kepulangan para alumni ke negara masing-masing, terutama ke Indonesia, harus diwaspadai karena dapat membawa amunisi bagi tumbuhnya ideologi dan gerakan jihad baru di negeri ini. Hal inilah yang pernah dilakukan oleh para veteran perang Afghanistan yang melakukan serangkaian operasi pengeboman terhadap pusat-pusat yang diidentifikasi sebagai musuh Islam, seperti bom Bali I pada tahun 2002. Kondisi semacam ini dikhawatirkan dapat melahirkan gelombang jihadis baru ke berbagai penjuru dunia dan menciptakan instabilitas keamanan di negara masing-masing, sebuah kondisi yang sudah barang tentu sangat perlu untuk diwaspadai (Ali, 2014, hlm. 339).

Pemerintah Indonesia menyatakan, Negara Islam bukanlah masalah agama melainkan ideologi atau keyakinan yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila, hal ini lah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia. Sejak awal banyak kalangan yang mengkhawatirkan penyebaran ideologi radikal kelompok ISIS akan membahayakan keberagaman masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan keras menyatakan, menolak ideologi yang diusung kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah, alias ISIS dan melarang pengembangan ideologinya di Indonesia (BBC, 2014).

D. Dukungan Gerakan Politik Kelompok Garis Keras Negara Islam Irak dan Suriah di Indonesia

Fakta sebagaimana tergambar di atas mengindikasikan bahwa salah satu kantong simpatisan dan pendukung gerakan NIIS di Indonesia adalah kelompok Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Ba'asyir.

Salah seorang provokator yang muncul di media YouTube berisi ajakan bagi sesama Muslim Indonesia bergabung dengan para pejuang NIIS adalah Abu Muhammad al-Indonesiy alias ahrumsyah. Keterlibatan Bahrumsyah bersama Forum Aktivis Syari'at Islam (Faksi) mempercepat pendeklarasian dukungan NIIS di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta, Ciputat, Banjarmasin, Bekasi, Solo, Sidoarjo, Malang, Bima, Lombok, dan Poso. Disinyalir dari bantuan Bahrumsyah pula, ditemukan fakta bahwa 56 orang Indonesia kini telah bergabung dengan NIIS di Iraq dan Suriah, sebagian kecil di antaranya telah terbunuh di medan perang akibat serangan pasukan AS dan sekutunya maupun bom bunuh diri (Solopos, 2014).

Secara sosiologis, target group untuk rekrutmen mereka adalah kelompok remaja yang secara psikologis masih berada pada masa transisi. Kelompok selanjutnya adalah kalangan awam yang sejak kecil tidak mengenyam pendidikan agama mendalam di pesantren. Ketika mereka bertemu dengan kaum jihadis, mereka merasa terlahir kembali menjadi Muslim (reborn Muslim). Dengan sisa-sisa usianya, mereka ingin bertobat (hijrah) dari masa lalu mereka yang kelam dengan cara berjihad (qitâl) di jalan Allah.

Kelompok inilah yang berusaha memperluas pengaruhnya di Indonesia melalui pengajian-pengajian rahasia. Sebagian dari mereka berhasil digulung atau dilumpuhkan oleh aparat keamanan, tetapi sebagian lagi masih menjadi TO (Target Operation) yang hingga kini belum tertangkap. Dari kelompok yang belum tertangkap inilah, sebagian melarikan diri ke pusat-pusat konflik di Timur Tengah dan bergabung dengan milisi NIIS.

Bukti-bukti adanya dukungan sejumlah masyarakat Muslim Indonesia terhadap NIIS juga dapat dilihat dari maraknya pemasangan gambar, mural, poster, dan bendera NIIS di sejumlah tempat, terutama di sekitar Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai basis gerakan radikalisme dan jihadisme paling aktif di negeri ini. Kemunculan simbol-simbol NIIS di sekitar Solo sebenarnya sudah muncul beberapa saat sebelum hebohnya tayangan propaganda NIIS di media massa. Misalnya, laman Pembela Tauhid dan Risalah Tauhid yang diyakini berafiliasi ke JAT aktif mengunggah informasi dan foto tentang kekerasan yang dilakukan oleh kaum jihadis di Timor Tengah, metode kekerasan, ightilayat cara membunuh secara diam-diam), propaganda NIIS, dan berbagai berita tentang penindasan dan penderitaan yang dialami oleh sesama Muslim di seluruh dunia. (Abu-Nimer, 2009, hlm. 148).

Diketahui bahwa dukungan terhadap NIIS pertama kali disuarakan oleh FAKSI (Forum Aktivis Syariat Islam), di mana Bahrumsyah bergabung, pada sebuah acara pengajian di masjid Fathullah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 8 Februari 2014. Tema yang diambil pada pengajian

tersebut adalah Support and Solidarity for NIIS. Setelah itu, sebuah kelompok yang menyebut dirinya sebagai Ansâr al-Khilâfah Jawa Timur mendeklarasikan dukungan mereka kepada NIIS pada tanggal 20 Juni 2014. Satu bulan setelah itu, dukungan yang sama juga muncul di Surakarta. Pada 4 Agustus 2014, kelompok pendukung NIIS sepakat mengganti nama NIIS menjadi SILIR, kependekan dari Suriah Indonesia Lan Iraq, supaya lebih mudah diingat. Empat hari kemudian, 8 Agustus 2014, sejumlah atribut NIIS juga bermunculan di Jambi (Republika Online, 2014)

Sementara itu, di sebuah masjid bernama masjid al-Muhajirin di Bekasi, dukungan terhadap NIIS juga dideklarasikan oleh sebanyak 50 orang jemaah pada 3 Agustus 2014. Selain sejumlah peristiwa di atas, terdapat pula indikasi dukungan terhadap NIIS di Malang dan Sidoarjo. Di Malang, dukungan terhadap NIIS diberikan oleh sebuah organisasi bernama Anshorul Khilafah. Pembaiatan dan pernyataan dukungan dilakukan di sebuah masjid di Kecamatan Dau Kabupaten Malang pada tanggal 20 Juli 2014. Sekalipun acara pendeklarasian dukungan terhadap NIIS ditampik oleh otoritas pemerintahan, pengakuan datang dari salah seorang “penyusup” yang menyamar sebagai bagian dari jemaah pendukung NIIS. Gerakan jihadis di Indonesia mengalami fase metamorfosis yang panjang. Pada awalnya adalah Jamaah Islamiyah (JI) yang didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir (ABB) di Solo (Wildan, 2013, hlm. 190-191).

Sekalipun keberadaannya banyak ditolak oleh sesama kelompok radikal dan jihadis, bukan berarti NIIS tidak memiliki

simpati dan dukungan sama sekali di negeri ini. Kehadiran 56 WNI yang sudah terlanjur bergabung dengan NIIS menjadi bukti sah bahwa gerakan jihadis ini juga menancapkan pengaruhnya atas sejumlah Muslim di Indonesia. Pengaruh NIIS dapat diidentifikasi pada ormas jihadis seperti JAT dan jaringan Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso. Pengaruh NIIS juga dapat ditemukan pada sejumlah individu jihadis yang bersifat klandestin. Hal ini ditunjukkan melalui penggeledahan pihak otoritas keamanan terhadap sejumlah tempat yang berhasil mengungkap sejumlah simbol yang tertulis melalui bendera atau mural yang bertuliskan persis seperti bendera ISIS. Akselerasi pengaruh NIIS di Indonesia dapat terjadi berkat bantuan media internet yang dengan cepat dapat menyebarkan ideologi khilâfah dan jihad yang diserukan oleh para tokohnya (The New York Times, 2014).

Pernyataan baiat Mujahidin Indonesia Timur kepada Daulah Islamiyah Irak dan Syam (ISIS) dari Abu Wardah Santoso Asy Syarqy Al-Indunisy kepada Amirul Mukminin Abu Bakar al-Husainy al-Qurasy al-Baghdady, Amir Daulah Islamiyah Irak dan Syam. Dukungan untuk jaringan Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Indonesia diorganisasi oleh sejumlah kelompok radikal lokal Islam. Motor utamanya, antara lain, Jemaah Anshurut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Baasyir, terpidana kasus terorisme (Republika, 2015).

BNPT menyatakan radikalisme Nasir Abas, selain kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso juga telah berbaiat pada ISIS. Banyak pihak

luar yang bukan anggota kelompok ini namun mendukung ISIS, maraknya dukungan untuk ISIS terlebih kelompok garis keras Islam di Indonesia dapat mendukung penyebaran ideologi radikal di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Maka seluruh masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam mencegah gerakan radikal dengan melaporkan bila ada kajian-kajian keagamaan yang menyimpang (Subandi, 2017).

Gerakan radikal dan intoleran dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. dukungan dari beberapa kelompok Islam radikal terhadap ISIS menyiratkan bahwa gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah memasuki elemen-elemen masyarakat Indonesia dan telah berkembang hal ini tentu dapat mengganggu pertahanan dan keamanan di Indonesia. Gerakan perjuangan ISIS dalam penyebaran ideologi telah diterima beberapa kalangan masyarakat yang bersedia mengikuti gerakan perjuangan di Irak dan Suriah atau gerakan radikal di Indonesia (Subandi, 2017).

E. Deradikalisasi Kebijakan Pemerintah Korelasinya dengan Ideologisasi Negara Islam Irak dan Suriah untuk Menjaga Stabilitas Politik keamanan di Indonesia

Ancaman gerakan politik Negara Islam di Indonesia dapat mengancam dalam berbagai bentuk, mulai dari propaganda atau penyebaran ideologi, hingga ancaman teror secara terbuka dan terang-terangan kepada aparat dan Pemerintah RI. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mewaspadaikan jaringan terorisme dari luar

negeri berkembang di Indonesia. Terlebih jaringan terorisme ISIS yang kini tengah merekrut anggota dari seluruh negara termasuk Indonesia. Dalam menanggulangi ancaman penyebaran ideologi BNPT mengupayakan upaya anti gerakan Radikal dengan program Deradikalisasi (Tahir, 2017).

Deradikalisasi adalah upaya untuk membendung radikalisme. Radikalisme ini perlu dibendung, karena gerakan dan pemikiran individu maupun kelompok yang berorientasi pada aktivitas radikal, seperti yang mengarah pada kekerasan, peperangan dan teror, yang sangat berbahaya bagi umat manusia (Tahir, 2017).

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan) (Hendropriyono, 2009, hlm. 13).

Dalam menjalankan kebijakan dan strateginya, BNPT menjalankan pendekatan holistik dari hulu ke hilir. Penyelesaian terorisme tidak hanya selesai dengan penegakan dan penindakan hukum

(hard power) tetapi yang paling penting menyentuh hulu persoalan dengan upaya pencegahan (soft power). Dalam bidang pencegahan, BNPT menggunakan dua strategi pertama, kontra radikalisme yakni upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kontra radikalisme diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan (Wijaya, 2007, hlm. 44).

Untuk Selanjutnya untuk membendung paham paham radikal yang menjadi akar dari gerakan radikal untuk melakukan aksi teror adalah dengan deradikalisasi ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas. Tujuan dari deradikalisasi agar; kelompok inti, militan simpatisan dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI (Wijaya, 2007, hlm. 44).

F. Keterlibatan Masyarakat dan Organisasi Keagamaan dalam Memelihara Stabilitas Politik Keamanan di Indonesia

Dideklarasikannya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) oleh sekelompok orang dan mengklaim secara sepihak sebagai kekhalifahan Islam secara global segera mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, ada yang menolak dan ada pula yang mendukungnya, ada yang menganggapnya sebagai ancaman dan ada pula yang menganggapnya sebagai harapan. Pihak yang menolak dan menganggapnya sebagai ancaman berasal dari sebagian besar umat Islam, termasuk para ulama dan pemimpin dunia Islam. Sedangkan pihak yang mendukung dan menganggapnya sebagai harapan berasal dari segelintir orang yang sejak awal telah mempunyai cita-cita untuk mendirikan kekhalifahan Islam secara global walaupun dengan menggunakan pendekatan kekerasan (Wijaya, 2007, hlm. 44).

Pihak yang menolak kemunculan ISIS beserta klaimnya sebagai kekhalifahan Islam global berasal dari hampir semua komponen umat Islam. Bahkan kelompok dalam umat Islam yang selama ini dikenal sebagai pihak yang gigih mewacanakan pentingnya khilafah Islamiyah juga masuk dalam barisan pihak yang menolak pengumuman ISIS tersebut. Alasan yang paling menonjol dan disepakati oleh hampir semua kelompok Islam adalah terkait dengan cara yang dipergunakan oleh kelompok ISIS yang jauh dari ajaran Islam. Cara yang dipakai lebih tepat disebut sebagai teror yang mengedepankan kekerasan, kebiadaban dan ketidak-toleranan (Wijaya, 2007, hlm. 44).

Salah satu lembaga keagamaan yang ada di Indonesia yang memiliki posisi yang tegas terhadap maraknya fenomena radikalisme adalah organisasi Nahdhatul Ulama (NU). Organisasi ini sangat banyak mengutarakan kecaman terhadap radikalisme di Indonesia. Secara individual, para ulama dan kiai NU diberbagai ceramah dan wawancara menunjukkan permusuhannya terhadap pemikiran-pemikiran radikalisme dan telah memperlihatkan upaya-upaya untuk ikut terlibat dalam memerangi pemikiran tersebut (Wijaya, 2007, hlm. 44).

NU memiliki posisi yang sangat penting dalam dinamika keberagaman di Indonesia. NU adalah salah satu organisasi tertua di Indonesia dan memiliki basis pendukung sekitar 40 juta orang dari semua kalangan baik di desa maupun di kota. Serta memiliki jaringan pesantren yang cukup besar di Indonesia maka tidak salah jika sebagian penduduk umat muslim di Indonesia mengikuti pandangan Nahdatul Ulama. Dalam kasus pergerakan Negara Islam, NU menghimbau masyarakat muslim Indonesia untuk membentengi diri dari paham radikalisme dan mengikuti gerakan perjuangan ISIS (Kabar Islam, 2014).

Menurut Nahdatul Ulama Gerakan Negara Islam Irak dan Suriah sudah bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam tidak menghalalkan kekerasan terlebih pemaksaan dalam beragama (Kabar Islam, 2014). Dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Muslim, dihimbau agar tetap dalam koridor yang benar dan tidak melenceng

dari nilai-nilai Al Qur'an dan Hadist (Kabar Islam, 2014).

Upaya yang dilakukan NU dalam mewaspadaikan penyebaran ISIS adalah dengan mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa, seperti pengajian, tahlilan, yasinan dan adanya kajian umum untuk masyarakat luas tentang pemahaman Islam yang sesungguhnya. Adapun dalam konteks pelibatan Muhammadiyah, Muhammadiyah memandang apa yang dilakukan ISIS justru dapat menyulut terjadinya kekerasan dan konflik yg meluas. Di tengah realitas politik umat Islam dan negara-negara Muslim, yang diperlukan adalah kerjasama antar bangsa dan antar negara (Azra, 2015, hlm. 56).

Dalam pendekatan dengan umat Muslim di Indonesia, tokoh informal dapat menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sebuah perkumoulan yang besar. Salah satu pendekatan Pemerintah dalam mencegah paham radikal, yaitu Pesantren sebagai *roll model* pemahaman radikal dikalangan remaja salah satunya pemimpin pondok-pondok Pesantren yang memiliki pengaruh besar pada sebagian santri-santri di Indonesia. Melihat target-target perekrutan jihadis ISIS di Indonesia merupakan kalangan remaja, maka penting bagi tokoh informal yaitu Ulama, atau Ustad, Uztadah memberikan pemahaman yang sesuai dengan syariat Islam. Dukungan kelembagaan Agama dalam hal ini NU dan Muhammdiyah serta para tokoh informal dapat memerangi paham-paham radikal intoleran yang menjadi akar aksi kekerasan di Indonesia yang dapat

memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI (Hamidin, 2017).

Selain partisipasi masyarakat umum dan kelembagaan, dalam mencegah pergerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki dasar hukum dan kelembagaan dalam menjaga stabilitas politik keamanan dari ancaman gerakan Negara Islam.

G. Konsistensi dan Komitmen Kelembagaan Pemerintah dalam memelihara Stabilitas Politik Keamanan di Indonesia

Untuk mengatasi masalah terorisme dan paham radikal, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perpres BNPT). Dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres BNPT dinyatakan bahwa BNPT mempunyai tugas, terdiri atas: 1). menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; 2). mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; dan 3). melaksanakan kebijakan di bidang

penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing (Subandi, 2017).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terorisme propaganda radikalisme dan terorisme, termasuk di dunia maya. Mengenai deradikalisasi oleh BNPT pada umumnya desain deradikalisasi memiliki empat pendekatan, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut (Subandi, 2017).

Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan cara memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme (Khan, 2008, hlm. 33).

Rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandiria adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima

pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, Ormas, dan lain sebagainya (Khan, 2008, h. 33).

Selain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas Politik Keamanan dengan adanya dukungan dari Kementerian Agama. Bentuk upaya Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir kelompok-kelompok radikal intoleran salah satunya dengan membubarkan kelompok-kelompok garis keras yang mengusung ideologi khilafah dan mencoba menghilangkan nilai-nilai Pancasila (Subandi, 2017).

H. Tantangan dan Peluang Dalam Memelihara Stabilitas Politik Keamanan di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai Negara bangsa yang hidup dan tumbuh berbasis keragaman suku bangsa, agama, kepercayaan serta adat istiadat yang berkembang melebihi umur republik ini. Karena faktor-faktor tersebutlah para pendiri bangsa ini merumuskan nilai-nilai dan falsafah bangsa yang disarikan dalam Pancasila dan juga pembukaan UUD sebagai basis konstitusi Negara (Muhaimin, 2008, hlm. 24).

Salah satu nilai yang ada adalah toleransi dan penghormatan kepada yang berbeda. Nilai-nilai tersebut termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari atau juga diwujudkan dalam kebijakan yang melindungi semua warga Negara tanpa terkecuali. Sayangnya,

seiring perjalanan waktu dan perkembangan global yang terus berubah, nilai dan prinsip tersebut terkikis sehingga menjadi sumber konflik sosial (Muhaimin, 2008, hlm. 24).

Salah satu permasalahan yang saat ini terus mengemuka ke dalam ranah publik Indonesia adalah Intoleransi dan radikalisasi agama. Intoleransi dan radikalisasi agama diwujudkan dalam pelarangan kegiatan ibadah keagamaan, penyebaran kebencian, kekerasan berbasis agama ataupun pengrusakan tempat ibadah (Muhaimin, 2008, hlm. 24).

Radikalisasi dan intoleran sebagai sebuah fenomena perilaku ekstrem atas sebuah ideologi, pandangan ataupun nilai sejatinya bukan dominan terjadi pada satu kelompok tertentu. Namun, fokus global terhadap isu terkait radikalisme dan terorisme kini banyak terpaku pada kelompok-kelompok berbasis Islam (Zachary, 2007, hlm. 56).

Melihat potensi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tidak menutup kemungkinan paham radikal dapat memasuki Indonesia dan merubah nilai-nilai ideologi Pancasila untuk kepentingan suatu kelompok (Awwas, 2001, hlm. 62).

Kelompok-kelompok radikal yang beratasnamakan agama, mencoba menyebarkan faham-faham baru yang bertentangan dengan faham Pancasila, dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya (Awwas, 2001, hlm. 62). Pemerintah mengambil langkah tegas untuk membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) radikal dan intoleran. Ormas dengan paham radikal dan intoleran, dinilai dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) (Awwas, 2001, hlm. 62).

Melihat potensi ancaman di Indonesia pada dewasa ini lahirnya kelompok-kelompok Islam yang dapat mempengaruhi keamanan dan nilai-nilai politik di Indonesia. Pemahaman terhadap sikap kelompok Islam ini penting, tidak saja karena kekuatan dan ideologi individu atau kelompok. Komitmen mereka terhadap ideologi politik Islam, dalam menegakkan khilafah-syariah disebabkan tetapi juga karena kegigihannya dalam oleh tingginya kebutuhan untuk menolak menyebarkan ideologi mereka sehingga mendapatkan dukungan masyarakat luas. Selain itu sebagian kelompok seringkali sikap dan perilaku politik mendorong munculnya gerakan radikal dalam masyarakat (Syafi'i, 1992, hlm. 22). Gerakan radikal ini dapat memicu berbagai konflik dan kelompok intoleran.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan tercermin dengan upaya pembubaran kelompok radikal dan intoleran yang dapat mengancam keutuhan NKRI (Syafi'i, 1992, hlm. 22). Salah satu kebijakan Pemerintah pada saat ini ialah membubarkan gerakan Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI berpendapat bahwa pembentukan khilafah dan penerapan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara harus diperjuangkan, karena negara dengan demokrasi bertentangan dengan nilai Islam (Turmudi & Sihbudi, 2016, hlm. 42).

Menko Polhukam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemerintah menganggap HTI dapat

mengancam kedaulatan negara. HTI disebut ingin menghapus negara Indonesia dan menggantinya dengan pemerintahan Islam (Erdianto, 2017). Pemerintah Indonesia melalui bidang terkait mencoba bersama menyelesaikan masalah kelompok radikal dan intoleran yang dapat mengancam persatuan NKRI. Mempertahankan nilai-nilai Pancasila merupakan dasar bagi Negara Indonesia. Gerakan kaum intoleran dan radikal sudah menguasai pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia. Kelompok intoleran dan radikal menyebarkan kebencian dengan berkedok agama secara masif, intensif dan berlanjut. Dengan dukungan aparat Negara dan dukungan keterlibatan masyarakat dapat membendung paham-paham radikal dan intoleran yang dapat mengancam stabilitas politik keamanan di Indonesia (Saeed, 2009, hlm. 434).

I. Peluang Pemerintah dalam Memelihara Stabilitas Politik di Indonesia

Melihat fakta-fakta yang menggambarkan bagaimana ancaman ideologis merasuk secara massif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Tanpa adanya penyerapan pengetahuan yang benar dan memadai terhadap ideologi Pancasila dalam setiap langkah dapat berimplikasi pada penerimaan pengaruh ideologi lain, termasuk persepsi mereka terhadap globalisasi, radikalisasi/ terorisme dengan berbagai atribut politiknya (Kompas, 2017).

Relevansi keseriusan pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan ideology Pancasila saat ini harus dimaknai kembali

sebagai itikad politik yang tepat sekali untuk mengingatkan bangsa dan negara mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka mengimplementasikan kembali dengan jujur dan sungguh-sungguh nilai-nilai ideologi Pancasila ini, perlu dilakukan upaya reaktualisasi yang terprogram dan terintegrasi oleh semua pihak (Kompas, 2017).

Dalam konteks ini negara harus mengambil langkah strategis yaitu peperlunya pengkajian oleh semua pihak adalah sistem dan model ketatanegaraan serta sistem politick/ pemerintahan yang dijabarkan dalam konstitusi UUD 1945 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai sekarang harus disesuaikan dengan ideologi Pancasila (Kompas, 2017).

Untuk itu mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan hal terpenting untuk menjaga kedaulatan NKRI. Pemerintah dengan ini menyatakan melarang paham, aliran dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Apabila sudah ada paham, aliran dan ideologi yang bertentangan maka kelompok tersebut harus segera di tindak lanjuti agar mereka tidak berkembang dan mengancam bangsa kita (Hamidin, 2017).

Pemerintah optimis dengan keterlibatan masyarakat Indonesia komitmen Pemerintah dengan asas Bhineka Tunggal Ikha dan sifat toleransi antar beragama dan saling menghormati perbedaan dapat mencegah nilai-nilai atau paham radikal intoleran yang dapat memecah belah bangsa. Bersama kita dapat melawan ideologi dan nilai-nilai

yang dapat membahayakan Pancasila (Hamidin, 2017).

J. Kesimpulan

Pertama, bentuk gerakan politik dijadikan sebagai instrument atau alat ideologisasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia, melalui penyebaran ideologi melalui media dan perekrutan jihadis di Indonesia, serta dukungan dari gerakan politik kelompok garis keras di Indonesia yang menyatakan dukungan serta aksi bai'at terhadap Gerakan ISIS merupakan bagian dari ideologisasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.

Kedua, kebijakan deradikalisasi dalam memerangi faham-faham radikal di Indonesia didukung oleh partisipasi masyarakat dan organisasi kelembagaan agama dalam hak ini bentuk dukungan NU dan Muhammadiyah dalam membentengi masyarakat Inddonesia dari faham-faham radikal intoleran, serta konsistensi pemerintah mengambil tindakan pembubran gerakan kelompok yang mencoba menghilangkan falsafah Pancasila untuk memelihara stanilitas politik keamanan di Indonesia.

Dengan adanya potensi ancaman gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dapat mengancam stabilitas politik keamanan di Indonesia, sehingga peningkatan tindakan pencegahan dari paham radikal intoleran merupakan upaya dalam memelihara stabilitas politik keamanan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ali, S. (2015). *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjang*. Jakarta: LP3ES.
- Asghar, K. (2008). *Islam, Politics and the State, the Pakistan Experiment*. London: Zeed Books Ltd.
- Ashari, Khansa. (2015). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Azyumardi, A. (2015). *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan*. Jakarta: Mizan.
- Budiardjo, M. (1983). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Buzan, Barry. (1991). *New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century*. Inggris: International Affairs.
- Buzan, B. (1983). *People, States, and Fear the National Security Problem in International Relations*. Inggris: A member of the Harvester Press Group.
- Fajar, P. (2014). *Jaringan Baru Teroris Solo*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Frisch, H. & Inbar, E. (2008). *Radical Islam and International Security: Challenges and Responses*. New York: Routledge.
- Hadi. (2015). *Akar Kemunculan Islam Radikal di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Holsti, K. J. (1992). *Politik Internasional dalam Kerangka Analisa*. Terjemahan Wawan Juwanda. Bandung: BinaCipta.
- Jacks, R. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Terjemahan Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kiras, J. D. (2005). *Terorism and Globalization in Baylis*. Dalam J. S. Steve (Ed.). *The Globalization of World Politics*. London: Oxford University Press.
- Koesnadi, K. (1999). *TNI Kembali ke Jati Diri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ma'arif, A. S. (2009). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan.
- Milton-Edwards. (2006). *Islam and Violence in the Modern Era*. New York: Palgrave Macmillan.
- Muhaimin, Y. (2015). *Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Pembinaan Pertahanan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nugroho, N. (2016). *Prajurit dan Pejuang Persepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Plano, J. C. (2001). *Kamus Analisa Politik*. Terjemahan Edi S Siregar. Jakarta: Rajawali.
- Saed, A. (2009). *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Spencer, R. (2002). *The Complete Infidel's Guide to ISIS*. Washington: Regnery Publishing.
- Sukma, R. (2002). *Konsep Keamanan Nasional*. Jakarta: CSIS.
- Sulistyo, H. (2009). *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*. Jakarta: Pensil 324.
- Syarifudin, J. (2016). *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Mandiri.

- Untung, R. S. (2011). *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Wijaya, A. (2015). *Laporan Kajian dan Permusan Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan dan Penanganan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Wirahadikusuma. (1999). *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zelin, A. Y. (2015). *The War Between ISIS and al Qaeda for Supremacy of the eGlobal Jihadist Movement*. New York: The Institute for the Study of War.

Jurnal:

- Bunzer, Cole. (2015). From paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State. *Jurnal Center for Middle East Policy*. No. 15. New Jersey: Princeton University.
- Crenshaw, Martha. (1981). The Causes of Terrorism. *Comparative Politics*. No. 4 Vol. 13 Edisi July, 1981.
- Hilmy, Masdar. (2014). Genealogi dan Pengaruh Jihadisme di Indonesia dalam jurna Teosofi Tasawuf dan Pemikiran Islam. Vol. 04 No. 02 Edisi Desember.
- Susetyo, Heru.(n.d.). Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia. *Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Lex Jurnalica* Vol. 6 No. 01.
- Tomsa, Dirk. (2016). The Jakarta Terror Attack and Its Implication for

Indonesia and Regional Security. *Research at Iseas Yosof Ishak Istiute Share Their Understanding of Current Events*. Vol. 01 No. 05 Edisi Januari.

Dokumen Resmi:

Kementerian Pertahanan Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan: Mempertahankan Tanah Air memasuki Abad 21*. Postur Pertahanan Negara 2015.

Surat Kabar:

Kompas, 1 Maret, 2016 Stop Radikalisasi, hlm. 26.

Internet:

- Barret, Richard. (2014). *The Islamic State*. (Online). (<http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2014/10/TSG-The-Islamic-State-Nov14.pdf>).
- BBC. (2014). *Syria Iraq: The Islamic State Militant Group*. (Online). (<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24179084>, diakses 5 Februari 2017).
- BBC. (2016). *Indonesia Larang Penyebaran Ideologi ISIS*. (Online). (http://www.bbc.co.uk/Indonesia/berita_indonesia/2016/08/140804.html, diakses 28 Februari 2017).
- Elgot, Jessica, dkk. (2015). *Paris Attacks: Day After Atrocity - As It Happened*. (Online). (<http://www.theguardian.com/world/live/2015/nov/14/paris->

- terrorattacks-attackers-dead-mass-killing-live-updates, diakses 28 Februari 2017).
- Erdianto, Kristian. (2017). *HTI: Kami Menolak Keras Pembubaran!*. (Online). (<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/12340701/hti.kami.menolak.keras.pembubaran>, diakses 27 Februari 2017).
- Kabar Islam. (2014). Pendapat Ulama: ISIS Sesat dan Menyesatkan. (Online). (<https://kabarislamia.com/2014/09/08/pendapat-ulama-isis-sesat-dan-menyestakan/>, diakses 20 Februari 2017).
- Kompas. (2014). *Sejumlah warga Indonesia muncul dalam video ISIS*. (Online) (<http://internasional.kompas.com/read/2014/07/30/09022331/Sejumlah.WarW.a.Indonesia.Muncul.Dalam.Video.ISIS>).
- Muhaimin. (2015). Militan Asing ISIS Datang ke Indonesia Melalui Malaysia. (Online). (<https://international.sindonews.com/read/1047128/40/militan-asing-isis-datang-ke-indonesia-melalui-malaysia-1442909703>, diakses 18 Februari 2017).
- Republika. (2015). *Begini Proses Perekrutan Anggota ISIS Hingga Pencarian Dana*. (Online). (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/19/nlgt59-begini-proses-perekrutan-anggota-isis-hingga-pencarian-dana>, diakses 19 Februari 2017).
- Rochmanuddin. (2015). 3 Ancaman ISIS ke Indonesia. (Online). (<http://news.liputan6.com/read/2373137/3-ancaman-isis-ke-indonesia>, diakses 7 Februari 2017).
- Soufangroup. (2015). *Foreign Fighters: An Update Assessment of the Flow of Foreign into Syria and Iraq*. (Online). (http://www.soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf).
- Sukma, Rizal.(n.d). *Konsep Keamanan Nasional*. (Online). (http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/konsep_kamnas_rs.pdf).